KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Diduga banyak kunker fiktif, DPR ramai-ramai bela diri
Tanggal : Jumat, 13 Mei 2016
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Diduga Banyak Kunker Fiktif, DPR Ramai-ramai Bela Diri

DPR kembali diterpa isu miring. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ditemukan dugaan kunjungan kerja (kunker) fiktif para anggota Dewan yang berpotensi merugikan negara Rp 945 miliar. Menanggapi hasil audit ini, para anggota DPR dan fraksi ramai-ramai membela diri.

DUGAAN itu mencuat setelah Fraksi PDIP membuat surat edaran bernomor 104/F-PDIP/DPR-RI/2016 tertanggal 10 Mei 2016, yang meminta para anggotanya untuk membuat laporan lengkap pelaksanaan kurker. Di surat itu disebutkan bahwa Sekjen DPR meragukan pelaksanaan kunker. Hal ini kemudian dikomentari ramai-ramai. Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan mempelajari temuan BPK tersebut.

DPR jelas khawatir dengan isu ini. Mereka pun mencoba membela diri. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan misalnya, menegaskan, tidak pernah ada kunker fiktif. Semua dilakukan dengan baik. Hanya saja pelaporannya dilakukan secara lump sum alias gelondongan, tanpa dirinci.

"Seluruh penggunaan alokasi anggaran DPR disusun oleh BURT (Badan Urusan Rumah Tangga). BURT itu ada yang namanya Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran (Akupa). Khusus untuk DPR dan pejabat eksekutif setingkat menteri, formatnya secara lump sum, bukan *at cost*. Ini sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan," ucapnya, kemarin.

Kata Taufik, dengan sistem anggaran lump sum, DPR mendapat dana sekaligus, tidak dirinci peruntukannya. Pertanggungjawabannya pun per paket anggaran. Anggota DPR tak melapor secara individu, tapi dikoordinir oleh fraksi.

Taufik mengaku sudah menjelaskan aturan itu ke Sekjen DPR Winantuningtyastiti Swasanani agar tidak ada kesalahpahaman.

"Saya sudah klarifikasi ke Sekjen DPR, jadi tidak dalam konteks kunker fiktif. Yang ada itu masih ada beberapa anggota yang belum melengkapi," kata politisi PAN ini.

PDIP punya cara tersendiri dalam membela diri. Lewat surat edaran tadi, Fraksi PDIP meminta para anggotanya segera menyerahkan laporan semua kegiatan kunker paling lambat 25 Mei nanti.

"Ada laporan yang tak memenuhi persyaratan. Pelaporan yang tak memenuhi syarat ini, susah diverifikasi. Makanya, kami mengambil inisiatif meminta kepada seluruh anggota Fraksi memperbaiki laporan tersebut," ucap politisi PDIP Hendrawan Supratikno, kemarin.

Menurut Hendrawan, fraksinya mengambil inisiatif itu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keuangan negara yang digunakan dalam tugas kedewanan. Dia pun memastikan pada laporan yang diberikan anggotanya lengkap dan bisa dipertanggungjawabkan.

"Fraksi kami tak bermasalah. Lebih dari 90 persen anggota telah menyerahkan dan bisa dipertanggungjawabkan. Surat edaran itu bertujuan agar para anggota memperbaiki bentuk laporannya. Itu saja," jelasnya.

Fraksi PKB juga ikut bela diri. Anggota Fraksi PKB Daniel Johan memastikan semua anggota fraksinya tidak ada yang membuat laporan kunker fiktif. Semua kurker dilakukan dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

"Kalau reses, semua anggota Fraksi PKB ke daerah. Nggak ada yang membuat laporan fiktif," ucapnya, kemarin.

Wakil Ketua Komisi IV mengklaim bahwa fraksinya memiliki buku laporan kegiatan dan keuangan kungker para anggotanya yang sangat lengkap. Fraksi PKB bahkan berani memamerkan foto-foto kegiatan reses dan kungker anggotanya di daerah.

"Kami sudah berusaha maksimal untuk mempertanggungjawabkan uang negara yang kami gunakan," cetusnya.

Fraksi Demokrat membela diri dengan cara lain. Sekretaris Fraksi Demokrat Didik Mukriyanto mengaku belum menerima surat dari Sekjen DPR soal kunker fiktif itu. "Hingga kami reses, belum menerima surat pemberitahuan itu," ucapnya.

Bermodalkan dokumentasi dan foto-foto kegiatan, Didik memastikan semua anggota Fraksi Demokrat melakukan kunker dengan baik. Makanya, untuk yang meragukan kunker Demokrat, bisa memverifikasi langsung.

"Fakta yang bisa memverifikasi itu dari foto, bagaimana anggota Dewan menyerap aspirasi di bawah," ucapnya. ■ ONI